

PRESS DISPUTE RESOLUTION: METODOLOGI RESOLUSI KONFLIK BERBASIS MEDIA (Studi Pro-Kontra Wacana Islam Nusantara pada Media *Online* Indonesia)

Kurnia Sari Wiwaha

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Email: wiwahakurnia@iainpurwokerto.ac.id

Ustadi Hamsah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ustadi.hamsah@uin-suka.ac.id

Abstract

Islam has been known as a religion of *Rahmatn lil'ālamīn* which guarantees inclusion and maintains a treatise on all humanity. However, the interpretation of universality of Islam does not meet a common understanding even though within Muslim community itself. Those diverse interpretations have resulted in how the universality of Islam has been expressed. One of those quarrels toward interpretation is the discussion of Islam Nusantara. West Sumatera is one of the regions in Indonesia which implements Islamic law as its customary law in which rejection against Islam Nusantara has been echoed across the borders. The rejection caused reactions from various parties since West Sumatera strongly stated the rejection as a way for preserving it. Those dispute has been sharpened by the online news in several Indonesian media that began to raise the phenomenon up. This research aim to find out how those medias frame the news and whether online media contribute on minimizing public tensions. This research used descriptive method with qualitative approach. The source of the data focused on Indonesian online media news on 2018 and was analyzed with framing analysis from Robert N. Entman and also using the concept of treatment recommendation as an analyzes of dispute resolution. The results discovered that media with its framing analysis technique has their own moral judgement and treatment recommendation as a form of dispute resolution towards discourses in the media. This moral judgment can show the tendency and alignment of a media regarding an issue. In addition, the media also has an important role in developing the audience's mindset in the midst of dispute it can be analyzed from the

treatment recommendation that can be used as a media based dispute resolution.

Keywords: Islam Nusantara; Framing; Press Dispute Resolution

Abstrak

Islam merupakan agama *rabbatan lil 'alamiin* dan bersifat universal serta hadir sebagai sebuah risalah seluruh umat manusia. Akan tetapi, pemaknaan terhadap universalitas Islam tidak seragam terlebih pemaknaannya bagi kalangan umat Islam itu sendiri. Hal ini menimbulkan banyak interpretasi yang bermacam-macam untuk mengekspresikan universalitas Islam ini. Salah satu bentuk interpretasi ini adalah munculnya istilah Islam Nusantara yang kembali menuai perdebatan. Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan hukum Islam dan adatnya yang sangat kuat menolak pengistilan ini. Penolakan ini menimbulkan banyak reaksi dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan, Sumatera Barat yang sangat menjaga kelestarian budayanya menolak wacana ini yang memiliki visi samaseperi yang dimiliki Sumatera Barat. Arena pertarungan ini diperluas oleh adanya pemberitaan di media-media *online* Indonesia yang mulai mengangkat fenomena ini. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana media membingkai pemberitaan dan apakah media juga memiliki peran untuk meminimalisasi ketegangan yang terjadi antara pihak yang bertikai. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh mengacu pada pemberitaan media *online mainstream* Indonesia pada tahun 2018 dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *framing* media model Robert N. Entman dan *treatment recommendation* sebagai bentuk *dispute resolution* wacana di media. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam pembingkai sebuah berita, media memiliki *moral judgement*-nya masing-masing. *Moral Judgement* ini yang dapat memperlihatkan arah atau keberpihakan suatu media terhadap suatu isu. Selain itu, media juga memiliki peranan penting dalam mendewasakan khalayak di tengah konflik. Hal ini terlihat dari adanya *treatment recommendation* yang dapat digunakan sebagai *dispute resolution* berbasis media.

Kata Kunci: Islam Nusantara; Framing; Press Dispute Resolution

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan negara dengan kekuatan budaya yang kental

tidak luput dari adanya perdebatan dua hal ini. Pada hakikatnya agama (Islam) dan budaya memiliki independensi masing-masing, akan tetapi keduanya mempunyai wilayah tumpang tindih.¹ Hal ini dapat dilihat dari nuansa kehidupan sosial Indonesia yang corak kulturalnya sangat kental diwarnai oleh nilai-nilai agama yang dominan di tiap-tiap daerah.² Dalam konteks keindonesiaaan muncul sebuah konsep yang terus berkembang sampai saat ini yakni Islam Nusantara. Islam Nusantara menjadi sebuah ciri khas tersendiri dari karakter keagamaan bangsa-bangsa di Nusanara (Indonesia), karena Islam hadir di Indonesia tanpa paksaan untuk meninggalkan budaya masyarakat lokal yang sudah mengakar sebelumnya.³

Istilah ini bukanlah sebuah istilah baru, akan tetapi ia kembali menjadi sebuah perbincangan pada tahun 2015 ketika organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU) hendak menjadikan Islam Nusantara sebagai tema Muktamar di Jombang 1 sampai 5 Agustus 2015 lalu.⁴ Hal ini ditambah dengan adanya fenomena pembacaan al-Quran dengan gaya langgam Jawa pada peringatan Isra Mi'raj di Istana Negara pada 15 Mei 2015 dan kembali menuai pertentangan bahwa membaca al-Quran dengan cara seperti itu merupakan perbuatan sinkretisme.⁵

Islam Nusanara menjadi sebuah fenomena menarik di tengah diskursus keislaman. Fenomena ini banyak mengundang

¹ Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam", dalam Akhmad Sahal, *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, Cetakan II, 2015), 33.

² Aulia Aziza, "Relasi Agama dan Budaya", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 15 No. 30, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antarsari Banjarmasin, 2016), 6.

³ Arik Dwijayanto, "Pribumisasi Islam Nusantara: Antara Nalar Beragama dan Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia", *Jurnal Qalamuna* Vol. 10 No. 2, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Sunan Giri, 2017), 72.

⁴ Ahmad Khoirul Fata dan Moh. Nor Ichwan, "Pertarungan Kuasa dalam Wacana Islam Nusantara", *Jurnal Islamica*, Vol. 11 No. 2, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 340.

⁵ Dini Safitri, "Kontestasi Retorika Islam Nusantara di Media Baru", *Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 11 No. 2, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), 220.

sarjana keiluhan Islam untuk meneliti lebih lanjut konsep dan metodologi wacana ini. Seperti penelitian yang dilakukan Tuti Munfarida⁶ dan Hanum Jazimah Puji Astuti⁷ yang mengupas tentang apa sebenarnya Islam Nusantara. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Ahamd Khoirul Fata, Moh. Nor Ichwan,⁸ dan Dini Safitri⁹ yang meneliti pertarungan wacana Islam Nusantara.

Pada tahun 2018 wacana Islam Nusantara kembali menghangat dengan adanya hasil rapat dari MUI Sumatera Barat yang menolak Islam Nusantara yang tengah dilegitimasi sebagai solusi perdamaian di Indonesia. Hasil dari rapat MUI ini menjadi sorotan dari berbagai media dan menjadikan isu penolakan ini memasuki arena yang lebih luas hingga ditanggapi langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.¹⁰ Keadaan memanas ketika MUI Sumatera Barat memberikan tanggapan kembali atas respon MUI Pusat.¹¹

Adanya konflik wacana sebagaimana di atas bahwa media massa memiliki peran sebagai sebuah arena pertarungan baru. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dengan adanya portal

⁶ Tuti Munfarida, “Islam Nusntar Sebagai Manifestasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mewujudkan Perdamaian,” *Jurnal Wabana Akademia*, No. 14 No. 1, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisngo Semarang, 2017).

⁷ Hanum Jazimah Puji Astui, “Islam Nusanta: Sebuah Argumentsi Beragama dalam Bingkai ultural” *Jurnal Inject*, Vol 2 No. 1, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017).

⁸ Ahmad Khoirul Fata dan Moh. Nor Ichwan, “Pertarungan Kuasa dalam Wacana Islam Nusantara”, *Jurnal Islamica*, Vol. 11 No. 2, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

⁹ Dini Safitri, “Kontestasi Retorika Islam Nusantara di Media Baru”, *Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 11 No. 2, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

¹⁰ Tanggapan dari PBNU bisa dilihat di beberapa portal berita antara lain: detiknews dengan judul berita “MUI Sumatera Barat Tolak Islam Nusantara, Ini Kata MUI Pusat”, tempo.co dengan judul berita “MUI Pusat Evaluasi Keputusan MUI Sumatera Barat Tolak Islam Nusantara”, dan CNN Indonesia dengan judul berita “MUI Sebut Penolakan Islam Nusantara Salahi Khittab”.

¹¹ Tanggapan MUI Sumatera Barat atas respons MUI Pusat ada dalam CNN Indonesia dengan judul berita “Khotbah, Ketua MUI Sumbar Harga Mati Tolak Islam Nusantara”.

media *online* akhirnya mempermudah khalayak dalam memperoleh informasi lebih luas. Ketika sebuah isu yang bersifat kontradiktif telah masuk pada pemberitaan media—khususnya media *online*—yang sangat mudah diakses oleh masyarakat luas hal ini akan memecah masyarakat menjadi dua kelompok antara pro dan kontra.

Media dalam peranan ini memiliki peranan yang sangat penting. Sebagaimana Stewart Hoover dan Knut Lundby dalam Linderman yang menyatakan bahwa agama, budaya, dan media merupakan sebuah segitiga yang saling berkaitan dan berpengaruh dalam masyarakat.¹² Dari pernyataan tersebut peneliti mengambil tiga portal berita *online* Indonesia yang banyak memfokuskan pemberitaannya pada wacana penolakan Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat. Portal yang diamobil peniliti antara lain adalah detiknews, tempo.co, dan CNN Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka yang akan menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana portal media *online* Indonesia memberitakan wacana penolakan Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat dan bagaimana kerangka yang dibuat media untuk meminimalisir ketegangan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana portal media *online* membungkai pemberitaannya dan kerangka yang dibuat media untuk meminimalisir ketegangan publik.

Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah postingan berita tentang wacana Islam Nusantara yang dibawa oleh MUI Sumatera Barat dan berita lainnya yang terkait di media *online*. Peneliti menemukan tiga portal berita yang sangat fokus atas wacana Islam Nusantara mulai dari pemberitaan penolakannya hingga pendapat para tokoh tentang penolakan istilah Islam Nusantara ini. Hal ini terlihat dari jumlah

¹² ALF. G. Linderan, “Approaches to the Study of Religion in the Media”, dalam Peter Antes dkk, *New Approaches to the Study of Religion: Textual, Comparative, Sociological, and Cognitive Approaches*, (Berlin dan New York: Waler de Griter, Vol. 2, 2004), 305.

berita yang diunggah mulai dari empat sampai enam judul berita dalam periode Juli hingga Agustus 2018. Portal berita tersebut meliputi detiknews, dengan enam judul berita,¹³ tempo.co dengan empat judul berita,¹⁴ dan CNN Indonesia dengan empat judul berita.¹⁵

Data yang digunakan peneliti merupakan teks berita dari portal media *online* tentang wacana penolakan Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat serta tanggapan beberapa tokoh atas penolakan ini. Adapun media *online* yang menjadi obyek penelitian adalah detiknews, tempo.co, dan CNN Indonesia. Data dari berita-berita tersebut akan menggunakan data kualitatif, yaitu data yang berbentuk teks, narasi dan kalimat.

Peneliti menggunakan teknik analisis *framing* model Robert N. Entman, yang merupakan salah satu metode dalam analisis wacana kritis. Analisa wacana kritis ini dapat digunakan untuk

¹³ Enam judul berita yang diunggah oleh detiknews adalah “MUI Sumatera Barat Tolak Islam Nusantara” dimuat pada 25 Juli 2018 Pukul 16:45 WIB, “MUI Sumatera Barat Tolak Islam Nusantara, Ini Kata MUI Pusat” dimuat pada 25 Juli 2018 Pukul 17:32 WIB, “Heboh Islam Nusantara” dimuat pada 26 Juli 2018 pukul 06:15 WIB, “MUI Pusat Evaluasi Keputusan MUI Sumatera Barat Tolak Islam Nusantara” dimuat pada 26 Juli 2018 pukul 10:40 WIB, “Ma’ruf Amin: Islam Nusantara Bagian dari RI, MUI Tidak Boleh Mencela” dimuat pada 26 Juli 2018 pukul 14:10, dan “Ma’ruf Amin: Islamnya MUI itu Islam Nusantara, Islam berkemajuan” dimuat pada 26 Juli 2018 pukul 21:26 WIB.

¹⁴ Empat judul berita yang diunggah oleh tempo.co adalah “Penjelasan MUI Mengenai Islam Nusantara: Itu Bukan Pokok Agama” dimuat pada 27 Juli 2018 pukul 06:43 WIB, “MUI: Islam Nusantara Hanya Istilah, Tidak Perlu dibesar-besarkan” dimuat pada 27 Juli 2018 pukul 07:03 WIB, “Guru Besar IAIN ini Sebut Tak Masalah Islam Nusantara Ditolak” dimuat pada 27 Juli 2018 pukul 08:13 WIB, dan “PBNNU: Islam Nusantara Bersumber dari Al-Quran” dimuat pada 27 Juli 2018 pukul 11:58 WIB.

¹⁵ Empat judul berita yang diunggah oleh CNN Indonesia adalah “MUI Sumbar: Islam Nusantara Tidak dibutuhkan di Ranah Minang” dimuat ada tanggal 25 Juli 2018 pukul 19:04 WIB, “MUI Sebut Penolakan Islam Nusantara Salahi Khittal” dimuat pada 25 Juli 2018 Pukul 20:50 WIB, “Khotbah, Ketua MUI Sumbar Harga Mati Tolak Islam Nusantara” dimuat pada 22 Agustus 2018 pukul 11:24 WIB, dan “Sekjen MUI Terima Jika Ada yang ak Setuju Islam Nusantara” dimuat pada 22 Agustus pukul 18:50 WIB.

melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas dan bagaimana peristiwa itu dipahami dan dibingkai oleh media.¹⁶ Asumsi dasar pada pembingkaian media pada sebuah pemberitaan terletak pada seleksi isu dan penonjolan aspek.¹⁷

Entman memberikan empat perangkat penting untuk mengetahui cara pandang media dalam memberitakan sebuah peristiwa yang akan dilakukan peneliti di setiap judul berita. Pertama, pendefinisian masalah (*define problem*) yaitu bagaimana sebuah peristiwa dilihat oleh media. Kedua, memperkirakan masalah (*diagnose cause*) yaitu elemen yang digunakan untuk menentukan siapa dan apa yang menjadi penyebab peristiwa tersebut. Ketiga, membuat keputusan (*make moral judgment*) yaitu pemberian argumentasi atas pendefinisian masalah yang familiar oleh khalayak. Keempat, menentukan penyelesaian (*treatment recommendation*) yaitu penilaian yang dikehendaki media atas ketiga elemen yang sudah dibuat sebelumnya.¹⁸ *Treatment recommendation* ini nantinya yang akan digunakan peneliti untuk menganalisi *press dispute resolution*.

Hasil dan Pembahasan

Berita mengenai penolakan istilah Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat ditemukan pada portal media *online* yaitu detiknews, tempo.co, dan CNN Indonesia. Teks berita yang telah didapat akan dianalisa menggunakan teknik analisis *framing* model Robert N. Entman dengan melakukan tiga langkah awal untuk mencapai *treatment recommendation* di setiap pemberitaan. Untuk melihat bagaimana tiap media membungkai pemberitaan peneliti

¹⁶ Kumala Citra Somara Singa, “Analisis *Framing* Pemberitaan Bom Sarinah di Kompas.com dan Merdeka.com”, *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 3 No. 2 (Riau: Universitas Riau, 2016).

¹⁷ Robert N Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, *Journal of Communication*. Vol. 43 No. 4. (Washington, D.C: International Communication Association, 1993), 52.

¹⁸ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LkiS, Cetakan VI), 225.

akan menggunakan analisi di setiap berita dengan menggunakan keempat elemen ini.

Perangkat atau element pertama yang diberikan Entman untuk melakukan analisis *framing* adalah *define problem*. Pada pemberitaan awal detiknews¹⁹ didefinisikan bahwa awal permasalahan peristiwa terletak pada keputusan MUI Sumatera Barat menolak adanya konsep Islam Nusantara yang diungkapkan langsung oleh ketua Umum MUI Sumatera Barat bahwasanya konsep Islam Nusantara tidak dibutukan di Ranah Minang. Pemeberitaan semakin memanas dengan munculnya pemberitaan kedua²⁰ hingga keempat²¹ tentang tanggapan MUI Pusat terkait penolakan MUI Sumatera Barat dan menjadikan wacana Islam Nusantara kembali menjadi sebuah fenomena besar dengan kehadiran berita ketiga.²²

Perangkat kedua yakni *diagnose cause*. Apabila dilihat dari pemberitaan kedua hingga keenam terlihat bahwa permasalahan terleak pada MUI Sumatera Barat yang tidak memahami Islam Nusantara secara utuh. Hal ini terihat pada pemberitaan kedua yang tertulis bahwa MUI Pusat mengatakan bahwa perdebatan mengenai Islam Nusantara akan melalaikan umat Islam dari berbagai persoalan pening dan penegasan bahwa Islam Nusantara memiliki makna universal.

Perangkat ketiga yakni *make moral judgment*. Pada pemberitaan yang ada di detiknews lebih menonjolkan kepada kesalahan dari MUI Sumatera Barat yang tidak memahami secara utuh dan penolakannya menjadikan umat Islam terkotak-kotakan. Hal ini

¹⁹ Danu Darmajati, “MUI Sumatera Barat Tolak Islam Nusantara”, dalam Detiknews, 25 Juli 2018, 16:45 WIB.

²⁰ Zunita Amalia Putri, “MUI Sumatera Barat Tolak Islam Nusantara, Ini Kata MUI Pusat” dalam Detiknews, 25 Juli 2018, 17:32 WIB.

²¹ Niken Purnamasari, “MUI Pusat Evaluasi Keputusan MUI Sumatera Barat Tolak Islam Nusantara”, dalam detiknews, 26 Juli 2018, pukul 10:40 WIB.

²² Danu Darmajati, “Heboh Islam Nusantara”, dalam Detiknews, 26 Juli 2018, 06:15 WIB.

dituliskan di setiap berita detiknews salah satunya di pemberitan kelima yang menyampaikan komentar Ma'ruf Amin:

“Prinsip MUI itu adalah wadah semua pihak. Karena itu, di MUI ada Islam Nusantara. MUI provinsi wajib mematuhi aturan MUI Pusat, tidak boleh menghantam salah satu pihak, karena MUI adalah wadah kita semua. Wadah kok hantam sana-sini. MUI gaduh dong”.

Pada akhirnya di dalam detiknews menyatakan untuk *treatment recommendation*-nya bahwa Islam Nusantara bukanlah sebuah hal yang harus diperdebatkan dan menyatakan kepada MUI Sumatera Barat untuk tidak menolak Islam Nusantara.

Pembingkaian berbeda dapat dilihat pada pemberitaan yang dihadirkan tempo.co. Tempo.co menghadirkan tiga judul berita untuk peristiwa penolakan Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat. *Define problem* yang dihadirkan pada pemberitaan ini disajikan dengan pemberitaan yang sifatnya *soft*. Hal ini terlihat dari pemberitaan pertamanya yang menyatakan bahwa Islam Nusantara hanya sebuah istilah yang konteksnya tidak perlu dipertentangkan atau diperbesar. Pernyataan ini didukung pada pemberitaan selanjutnya yang mengatakan bahwa Islam Nusantara bukanlah sebuah permasalahan besar, tidak masuk dalam pokok agama, dan tidak bersifat substansi.

Diganose cause yang diberikan pada tempo.co memperlihatkan bahwa tidak ada permasalahan besar, karena Islam Nusantara hanya sebuah istilah dan metode dakwah. Jadi, bukanlah sebuah masalah besar ketika ada yang menolak. *Moral judgement* yang dihadirkan tempo.co justru menyayangkan sikap MUI Pusat atas peristiwa ini, karena sikap tersebut justru hanya akan memperkeruh suasana umat Islam. Pada akhirnya *treatment recommendation* pada tempo.co lebih kepada MUI Pusat dan MUI Sumatera Barat untuk tidak bersikap berlebihan atas Islam Nusantara, tidak perlu ditolak dan tidak perlu pula dibela. Karena Islam Nusantara hanya sebuah tradisi keislaman di Indonesia.

CNN Indonesia memperlihatkan pembingkaian yang berbeda pula. Pemberitaan di CNN Indonesia membingkai posisi MUI Sumatera Barat sebagai aktor yang keras dan membingkai MUI Pusat sebagai peminalisir ketegangan. Pada elemen pertama analisis *framing*, CNN Indonesia memperlihatkan keteguhan MUI Sumatera Barat pada penolakannya terhadap Islam Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan pertama²³ dan ketiga²⁴ yang menyatakan bahwa MUI Sumatera tanpa keraguan menolak Islam Nusantara. Kemudian di pemberitaan kedua²⁵ *define problem* terletak pada bagaimana tanggapan MUI Pusat atas penolakan Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat yang mengatakan bahwa MUI Sumatera Barat telah menyalahi jati diri MUI sebagai wadah musyawarah dan silaturahmi ulama. Pada pemberitaan terakhirnya²⁶ terlihat bahwa MUI Pusat menerima penolakan MUI Sumatera Barat ini, sebab penolakan ataupun penerimaannya tidak perlu dipersoalkan kembali.

Diagnose cause dalam pemberitaan yang disampaikan CNN Indonesia memperlihatkan bahwa Islam sudah sempurna dan tidak perlu ditambah dengan pelabelan istlah lain, hal ini lah yang memperlihatkan posisi keras MUI Sumatera Barat. Sedangkan untuk pemberitaan sikap MUI Pusat *diagnose cause* memperlihatkan bahwa Islam Nusantara hanyalah sebuah konsep atau hasil pemikiran dan tidak sampai kepada penolakan yang sifatnya masuk ke dalam pokok agama.

Moral judgement pada pemberitaan di CNN Indonesia ini menjelaskan pendefinisian masalah pada perangkat awal. MUI

²³ Ihsan Dalimunthe, “MUI Sumbar: Islam Nusantara Tidak Dibutuhkan di Ranah Minang”, dalam *CNNIndonesia*, 25 Juli 2018, 19:04 WIB.

²⁴ Dinda Audriene Muthmainnah, “Khotbah Ketua MUI Sumbar ‘Harga Mati’ Tolak Islam Nusantara”, dalam *CNNIndonesia*, 22 Agustus 2018, pukul 11:24 WIB.

²⁵ Ihsan Dalimunthe, “MUI Sebut Penolakan Islam Nusantara Salahi *Khittath*”, dalam *CNNIndonesia*, 25 Juli 2018, 20:50 WIB.

²⁶ Bimo Wiwoho, “Sekjen MUI Terima Jika Ada yang Tidak Setuju Islam Nusantara”, dalam *CNNIndonesia*, 22 Agustus 2018, Pukul 18:50 WIB.

Sumatera Barat menjelaskan bahwa Islam Nusantara secara tidak langsung telah memicu lahirnya Isla Radikal serta Kekecewaan MUI Sumatera Barat kepada pemerintah pusat yang menanggapi dan menudukung Islam Nusantara yang merupakan konsep kelompok. Ada akhrinya penolakan Islam Nusantara ini diakhiri dengan pembiatan keputusan MUI Sumatera Barat. Wakil Sekjen MUI tidak lagi ingin mengangkat suara perihal tindakan yang akan dilakukan kepada MUI Sumatera Barat.

Sekilas tentang Islam Nusantara

Muncul dan berkembangnya Islam di Indonesia tidak pernah terlepas dari sejarah panjang Nusantara. Sebelum Islam datang, Indonesia sudah memiliki dan menjaani sebuah sistem budaya dan agama yang sudah menjadi warna khas setiap daerah. Sebab itu, akan sangat sulit untuk melepas, mencabut atau menghilangkan kekayaan budaya local yang telah tertanam kuat. Ketika Islam hadir, dengan bantuan para wali sebuah ajaran yang secara tradisi sangat berbeda dapat diterima, di sinilah bermula suatu proses Islamisasi Indonesia.²⁷

Salah satu bentuk dari Islamisasi Indonesia adalah melahirkan sebuah gagasan yang menggambarkan Islam sebagai ajaran normatif dapat diakomodasikan ke dalam kebudayaan.²⁸ Gagasan awal berupa Pribumisasi Islam yang diusung oleh Gus Dur. Gagasan ini memiliki konsep yang memaknai Islam dengan sifat *shalihun li kulli zaman wa makan*. Konsep ini dapat mengakomodasikan keislaman dan menyerap budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai itu sendiri.²⁹

²⁷ Ahmad Syarif Maarif, “Sublimitas Islam di Indonesia”, dalam M. Abdul Karim, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Ar-Rizz Media, Cetakan III, 2013), 31-32.

²⁸ Edy Susanto dan Karimullah, ”Islam Nusantara: Islam Khas dan Akomodasi terhadap Budaya Lokal”, *Jurnal Al-Ulum* Vol. 16 No. 1. (Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri Gorontalo, 2011), 63.

²⁹ Tri Wahyudi Ramdhan, “Islam Nusantara: Pribumisasi Islam ala NU”, dalam *Jurnal Al-I*

Ide Pribumisasi Islam yang berarti Islam sebagai agama universal harus dibumikan ke dalam budaya lokal. Dari sini lahirlah Islam Nusantara yang bermakna Islam yang berbudaya Indonesia. Menyandangkan “Nusantara” terhadap kata “Islam” dinilai masih kurang tepat. Hal ini disebabkan penyandangan kata tersebut dapat diartikan bahwa Islam memiliki bagian-bagiannya dan jenis-jenisnya.³⁰ Pada hakikanya, Istilah Islam Nusantara bukan hanya bermaknakan Islam di Nusantara. Islam di Nusantara hanya menunjukkan tempat saja dan tidak memiliki hubungan apalagi pengaruh dengan Islam, sedangkan Islam Nusantara dapat dipahami sebagai Islam dengan corak, warna, kekhasan, keunikan, karakter budaya Nusantara.³¹ Dalam logika sebagaimana di atas, gagasan tentang Islam Nusantara dapat dipahami, sehingga Islam Nusantara merupakan perwujudan nilai-nilai Islam yang sudah beraktualisasi dengan budaya lokal yang datang bukan untuk mengubah doktrin Islam, melainkan ingin membentuk tafsiran ajaran yang sesuai dengan konteks kebudayaan masyarakat Indonesia.

Islam Nusantara memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir Islam. Menurut Muhajir dalam Sahal dan Aziz: 2015 Islam Nusantara merupakan paham praktek keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks dengan realitas dan budaya setempat.³² Pemaknaan lain dikemukakan oleh Bizawie dalam Sahal dan Aziz: 2015 bahwasanya Islam Nusantara merupakan Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal budaya, adat istiadat di tanah air.³³ Definisi pertama

³⁰ Tri Wahyudi Ramdhan, “Islam Nusantara...., 74.

³¹ Mohammad Guntur Romli dan Tim Ciputat School, *Islam Kita, Islam.....,* 24.

³² Afifuddin Muhajir, “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”, dalam Akhmad Sahal, *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung: Mizan, Cetakan III, 2016), 67.

³³ Zainl Milal Bizawie, “Islam Nusantara Sebagai Subjek dalam Islamic Studies: Lintas Diskursus dan Metodologis”, dalam Akhmad Sahal, *Islam*

menjelaskan bahwa Islam Nusantara merupakan paham Islam dan implementasinya yang berlangsung di kawasan Nusantara sebagai akibat sintesis antara wahyu dan budaya lokal, sedangkan definisi kedua menjelaskan Islam yang berkarakter Indonesia tetapi juga sebagai hasil sintesis antara nilai Islam teologis dan nilai tradisi lokal.³⁴

Semenjak kran demokrasi terbuka lebar ditandai runtuhnya Orde Baru, Indonesia menjadi lahan empuk bagi ideoloji untuk datang. Ruang politik mulai dipenuhi dengan partai-partai baru, akan tetapi dari 130 yang medaftar hanya lima partai saja yang layak diperhitungkan. Partai-partai ini dipimpin oleh muka-muka lama seperti Golongan Karya (Golkar) di bawah Akbar Tanjung, PDI-Perjuangan di bawah Megawati Soekarnoputri, dan tiga partai besar berbasis agama; yakni PPP, PAN dan PKB. Dengan diterimanya tiga partai ini, Aktivis DDII segera mendirikan partai dengan corak Islami. Akan tetapi, tidak diterima karena kalah jumlah dibandingkan ormas-ormas Muslim arus utama.³⁵

Kunjungan ideologi-ideologi ini sangat mempengaruhi identitas kebangsaan Indonesia salah satunya ideologi keagamaan (Islam). Ideologi yang datang utamanya berasal dari dua arah, ideologi Arab dengan gaya fundamentalismenya dan budaya Barat dengan pola liberalismenya. Kehadiran dua ideologi ini menjadikan amat sulit sekali untuk membedakan antara budaya dan agama. Pada saat inilah, gagasan keislaman berbasis identitas lokal menjadi sebuah sikap baru untuk menghadapi ideologi-ideologi baru ini.

Nusantara: dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan, (Bandung: Mizan, Cetakan III, 2016), 239.

³⁴ Mujamil Qomar, “Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam”, *Jurnal El Harakah*, Vol. 17 No. 2, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 200.

³⁵ Carool Kersten, *Berebut Wacana : Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Era Reformasi*, diterjemahkan oleh: M. Irsyad Rafsadie, Judul Asli *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas, and Values*, (Bandung: Mizan, Cetakan I, 2018), 9.

Inilah yang menjadikan Islam Nusantara mendapatkan nilai substansinya.³⁶

Framing Media terhadap Isu Islam Nusantara

Pemberitaan media *online* mengenai penolakan Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat menghadirkan perspektif tertentu untuk memaknai suatu argumentasi agar dapat diterima berbagai pihak. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan dalam pemberitaan penolakan Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat. Media massa dalam hal ini media *online* telah menyusun, menyeleksi isu, dan menonjolkan aspek tertentu. Setiap pemberitaan ini memberikan citra tersendiri pada aktor yang ditampilkan yang peneliti bagi menjadi dua, yakni MUI Sumatera Barat dan MUI Pusat. Citra yang dibangun terpetakan sebagai berikut:

Tabel 1: Citra yang Dibangung tiap Media

Media	MUI Sumatera Barat	MUI Pusat/PBNU
<i>Detiknews</i>	Pihak yang terpojokan dengan sikapnya yang tidak bijak dan profesional	Aktor sebagai pihak di posisi yang benar
<i>Tempo.co</i>	Netral, MUI Sumbar memiliki hak untuk memiliki perbedaan pendapat	Tidak memperbesar tanggapannya tentang perbedaan pendapat ini
<i>CNN Indonesia</i>	Pihak kontra keras	Penengah dan peminimalisir ketegangan

Pada empat elemen yang diberikan Robert N. Entman, peneliti melihat penonjolan aspek yang berbeda pada setiap berita. Pertama, pada pendefinisian masalah (*define problem*), penonjolan

³⁶ Taufik Bifagih, “Islam Nusantara; Strategi Kebudayaan NU di Tengah Tantangan Global”, *Jurnal Aqlam*, Vol. 2 No, 1, (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2016), 54.

penolakan Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat dalam CNN Indonesia memperlihatkan sikap yang kuat untuk tetap menolak hadirnya Islam Nusantara. Berbeda dengan detiknews dan tempo.co yang tidak terlalu menonjolkan penegasan kuat atas penolakan Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat.

Kedua, pada *diagnose cause* yang menjadikan pemicu hangatnya isu penolakan Islam Nusantara lebih banyak ditampilkan oleh detiknews. Media ini lebih menerangkan secara jelas pemicu penolakan Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat yang dinilai berpotensi mengotak-ngotakkan umat Islam serta memunculkan pandangan negatif kepada saudara-saudara muslim yang lain.

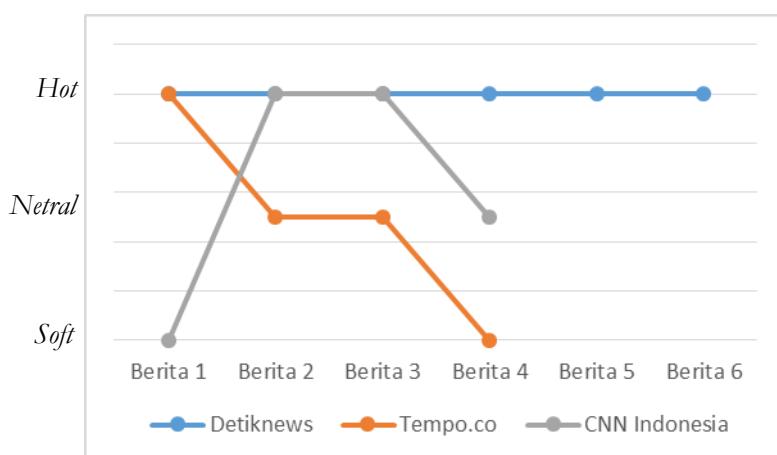
Setelah mendefinisikan masalah dan mendiagnosa penyebab permasalahan, peneliti memberikan argumentasi pada pendefinisian masalah yang diberikan di elemen pertama. Argumentasi berbeda akan memperlihatkan bagaimana media berusaha untuk menggiring opini publik pada pemberitaannya.

Tabel 2: Argumentasi atas Pendefinisian Masalah (*Moral Judgement*) pada setiap Pemberitaan

Press	<i>Detiknews</i>	<i>Tempo.co</i>	<i>CNN Indonesia</i>
Berita 1	MUI Sumbar menilai Islam Nusantara mengandung penyempitan makna Islam yang universal dan membawa kerancuan dan kebingungan dalam memahami Islam	MUI Pusat menyesalkan keputusan MUI Sumbar menolak Islam Nusantara, karena menyalahi jati diri MUI sebagai wadah berhimpun para ulama dan cendikiawan muslim	MUI Sumbar menjelaskan jika Islam Nusantara adalah Islam yang toleran dan tidak radikal maka secara tidak langsung telah menuduh Islam Timur Tengah sebagai Islam yang radikal dan pemicu kekerasan
Berita 2	MUI Pusat menilai penolakan yang dilakukan oleh MUI Sumbar hanya karena frekuensi pemahaman yang berbeda	Islam Nusantara hanya istilah tidak perlu dibesar-besarkan karena dapat merusak persaudaraan umat Islam	MUI Pusat menjelaskan bahwa MUI harus berperan sebagai tenda pemersatu umat dan harus mengedepankan toleransi dalam menyikapi berbagai persoalan dan bukan menciptakan perpecahan

Berita 3	MUI Sumbar hendaknya memahami Islam Nusantara secara menyeluruh	Islam Nusantara adalah metode dakwah yang menggunakan pendekatan tradisi dan budaya nusantara	MUI Sumbar mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang ikut bicara mengenai Islam Nusantara, sebab Islam Nusantara merupakan sebuah konsep kelompok dan bukan nasional
Berita 4	MUI harus bijak menyikapi perbedaan sebuah pandangan dengan melihat panduan yang dimiliki	Islam Nusantara sama seperti istilah-istilah sebelumnya; Islam Berkemajuan oleh Muhammadiyah dan Islam Washatiyyah oleh MUI	Sekjen MUI Pusat menerangkan bahwa perbedaan pada sebuah pemikiran adalah hal wajar dan tidak bisa dipaksakan kepada semua orang untuk menerimanya
Berita 5	Ma'ruf Amin menerangkan sikap MUI dapat menampung semua ajaran termasuk Islam Nusantara		
Berita 6	Prinsip MUI adalah wadah semua pihak dan tidak boleh menghantam salah satu pihak		

Tabel tersebut memperlihatkan adanya penonjolan aspek berbeda yang dilakukan oleh media-media massa ini. Pemetaan yang dilakukan oleh peneliti ini terlihat bahwa tiap-tiap media massa memiliki kepentingan berbeda dalam memberitakan sebuah isu. Beberapa memberitakannya secara damai atau menggunakan kalimat yang lebih menenangkan dan ada pula yang memberikan unsur provokatif dalam memberitakan wacana Islam Nusantara. Hal ini kemudian dipetakan atau dikelompokan kembali oleh peneliti dengan berita keras (provokatif), sedang (hanya menjembatani), dan lembut (damai).



Gambar 1: Grafik Pemberitaan Penolakan Islam Nusantara di Media Massa

Grafik di atas terlihat bahwa *Detiknews* lebih memberitakan isu penolakan Islam Nusantara ini dengan bahasa yang menggiring *audience* untuk menilai sikap atau keputusan MUI Sumatera Barat adalah keputusan yang salah. Hal ini akan menggiring opini publik untuk menentukan sikapnya antara pro atau kontra. Dengan kata lain, pemberitaan yang dilakukan media massa ini dapat memecah masyarakat kepada dua kelompok berbeda.

Penggiringan opini publik akan perselisihan MUI Pusat dan MUI Sumatera Barat diperlihatkan dari pemberitaan Rapat yang

dilakukan MUI Sumatera Barat untuk menyikapi penolakan ini dan MUI Pusat untuk merespons sikap MUI Sumatera Barat.



Gambar 2: Rakorda MUI Sumatera Barat³⁷



Gambar 3: Rapat Fatwa MUI Pusat³⁸

Dengan dipilihnya dua foto tersebut penggambaran yang diberikan *Detiknews* lebih terlihat kepada sebuah pergesekan antara dua pihak tersebut. Setelah ketegangan yang diberikan media ini kemudian dilanjutkan dengan diangkatnya sebuah pendapat dari MUI Pusat bahwa MUI Sumatera Barat telah menyalahi *khittah* dan jati dari MUI. Hal ini disebutkan Wakil Ketua Umum MUI Pusat Zainut Tauhid:

“Ada hal yang perlu diklarifikasi dari keputusan Rapat Koordinasi Bidang Ukhwah MUI Provinsi Sumatera Barat karena menurut saya sudah menyalahi *khittah* dan jati dari MUI sebagai wadah berhimpun, musyawarah, dan silaturahmi para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim dari berbagai kalangan dan organisasi.”³⁹

Setelah pemberitaan tentang respon MUI Pusat yang menyalahi sikap MUI Sumatera Barat, kemudian hadir di berita berikutnya yang memberikan pemberitaan tentang pernyataan Ma'ruf Amin yang menilai bahwa sikap MUI Sumatera Barat ini

³⁷ Danu Darmajati, “MUI Sumatera Barat Tolak Islam Nusantara”, dalam *Detiknews*, 25 Juli 2018, 16:45 WIB.

³⁸ Zunita Amalia Putri, “MUI Sumatera Barat Tolak Islam Nusantara, Ini Kata MUI Pusat” dalam *Detiknews*, 25 Juli 2018, 17:32 WIB.

³⁹ Danu Darmajati, “MUI Sumatera Barat Tolak Islam Nusantara”, dalam *Detiknews*, 25 Juli 2018, 16:45 WIB.

merupakan suatu penghinaan terhadap suatu aliran. Ia menyebutkan:

“Pokoknya kita MUI tidak boleh mencela salah satu aliran. Itu bagian dari Indonesia.”

“MUI itu semua, Islam Nusantara, Islam Berkemajuan semua kita tampung, MUI kan sebagai perekat representasi umat. Islam... itu semua bagian MUI kecuali menyimpang.”⁴⁰

“Iya harus (ikut aturan), harus. Kalau ada MUI yang menghantam salah satu pihak, tidak boleh karena kita wadah semua. Wadah kok hantam sana-sini, MUI gaduh dong.”⁴¹

Moral judgement yang diangkat dari pemberitaan yang dilakukan oleh *Detiknews* lebih menempatkan MUI Sumatera Barat sebagai citra yang negatif. *Detiknews* memberitakan sikap penolakan MUI Sumatera Barat dengan bahasa yang lebih provokatif dan menyudutkan MUI Sumatera Barat secara terang-terangan. Kedua media massa ini lebih menonjolkan bahwa sikap penolakan seperti ini adalah sebuah kesalahan yang akan memicu perpecahan antara umat Islam.

Hal lain ditunjukkan oleh *Tempo.co*. Grafik tersebut terlihat adanya penurunan ketegangan dari satu berita ke berita lainnya. Walaupun pada awal pemberitaan media massa ini juga memberitakan adanya sebuah penyesalan atas tindakan atau sikap penolakan MUI Sumatera Barat ini, akan tetapi bahasa yang digunakan dan dipilih tidak mengandung unsur provokatif atau menyudutkan. Hal ini terlihat dengan adanya bahasa-bahasa yang lebih mengajak kepada peminimalisasian atas ketegangan yang dirasakan oleh MUI Sumatera Barat khususnya.

“Seharusnya MUI sebagai tenda besar umat Islam bisa menjadi pemersatu dan perekat persaudaraan (ukhuwah)

⁴⁰ Andhika Prasetya, “Ma’ruf Amin: Islam Nusantara Bagian dari RI, MUI Tidak Boleh Mencela” dalam *Detiknews*, 26 Juli 2018, 14:10 WIB.

⁴¹ Matius Alfons, “Ma’ruf Amin: Islamnya MUI itu Islam Nusantara, Islam Berkemajuan”, dalam *Detiknews*, 26 Juli 2018, 21:26 WIB.

Islamiah, bukan sebaliknya, MUI harus bisa mengedepankan semangat persaudaraan (ukhuwah) dan moderasi (tawazun) dalam menyikapi berbagai persoalan khususnya yang berkaitan dengan masalah umat Islam.”⁴²

Setelah pemberitaan akan anjuran bersikap yang sebaiknya ditempuh MUI Sumatera Barat, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasan untuk meminimalisasi ketegangan emosi MUI Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari *headline* berita yang berusaha menawarkan sebuah pertimbangan untuk menyudahi sikapnya ini.



Gambar 4: *Headline Tempo.co 27 Juli 2018*



Gambar 5: *Headline Tempo.co 27 Juli 2018*



Gambar 6: *Headline Tempo.co 27 Juli 2018*



Gambar 7: *Headline Tempo.co 27 Juli 2018*

Moral judgement yang diberikan oleh *Tempo.co* tidak menyebutkan aktor tertentu secara terang-terangan. Media massa ini lebih menempatkan keduanya untuk tidak menyikapi dan menanggapi wacana ini kepada sebuah pergesekan yang besar.

⁴² Elik Susanto, “Penjelesan MUI Mengenai Islam Nusantara: Itu bukan Pokok Agama” dalam *Tempo.co*, 27 Juli 2018, 06:43 WIB.

Islam Nusantara hanya sebuah istilah dan metode dakwah yang boleh saja ditolak tanpa adanya paksaan untuk memakainya.

Berikutnya *CNNIndonesia* hampir memberitakan wacana penolakan Islam Nusantara ini dengan konteks yang sama. Kedua media ini menempatkan MUI Sumatera Barat sebagai pihak yang sangat keras untuk menolak Islam Nusantara ini. Terlihat dari beberapa *headline* berita yang diangkat menyatakan bahwa MUI Sumatera Barat sangat teguh pada pendiriannya untuk menolak wacana ini.



Home < Nasional < Berita Peristiwa

MUI Sumbar: Islam Nusantara Tidak Dibutuhkan di Ranah Minang

Ihsan Dalimunthe, CNN Indonesia | Rabu, 25/07/2018 19:04 WIB

Gambar 8: *Headline CNNIndonesia 25 Juli 2018 Pukul 19:04 WIB*



Home < Nasional < Berita Peristiwa

Khotbah, Ketua MUI Sumbar 'Harga Mati' Tolak Islam Nusantara

Dinda Audriene Muthmainah, CNN Indonesia | Rabu, 22/08/2018 11:24 WIB

Gambar 9: *Headline CNNIndonesia 22 Agustus 2018 Pukul 11:24 WIB*

Setelah memberikan argumentasinya lewat *moral judgement* peneliti mendapatkan *treatment recommendation* yang diberikan tiap-tiap media.

Tabel 3: Treatment Recomendation sebagai Press Dispute Resolution

Press	Berita 1	Berita 2	Berita 3	Berita 4	Berita 5	Berita 6
<i>Detiknews</i>	Islam Nusantara tidak dibutuhkan di Ranah Minang	Islam Nusantara hendak dipahami secara utuh dan proposisional	Islam Nusantara merupakan penekanan ciri loka orang Indonesia dan bukan golongan baru atau bahkan agama baru	Islam Nusantara masuk dalam kategori furu'iyyah dan tidak perlu dibesar-besarkan	Ma'ruf Amin akan memberikan teguran kepada MUI Sumbar	
<i>Tempo.co</i>	MUI harus menjadi media pemersatu umat		Islam Nusantara sama dengan tradisi keislaman lainnya dan sebaiknya jangan ditolak	Islam Nusantara tidak perlu dibesar-besarkan		
<i>CNN Indonesia</i>	Tidak ada Islam Minang	Islam Nusantara bukan permasalahan pokok agama (ushuliy)	Perlu adanya definisi yang jelas tentang Islam Nusantara	Tidak adanya paksaan untuk menerima atau menolak sebuah pemikiran		
<i>Treatment Recomendation sebagai Press Dispute Resolution</i>	Keutuhan NKRI	Islam Nusantara bukan permasalahan pokok agama (ushuliy)	Pendefinisian ulang Islam Nusantara	Hasil sebuah pemikiran tidak perlu dipaksakan untuk diterima atau ditolak		

Treatment recommendation yang diberikan *Detiknews* lebih kepada MUI Sumatera Barat untuk mengevaluasi sikap penolakannya tersebut. Hal ini terlihat dari adanya anjuran MUI Pusat kepada MUI Sumatera Barat untuk memahami Islam Nusantara secara utuh dan profesional. Rekomendasi dipertegas oleh Ma'ruf Amin sebagai pihak NU yang akan menegur sikap yang telah dilakukan oleh MUI Sumatera Barat ini.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *moral judgement* yang berbeda akan menawarkan rekomendasi yang berbeda pula. *Treatment recommendation* yang ditawarkan *CNNIndonesia* dan *Tempo.co* lebih kepada adanya sebuah anjuran untuk dilakukan keduanya. Media massa ini memberikan rekomendasi kepada pihak kontra Islam Nusantara (MUI Sumatera Barat) untuk tidak lagi mempermasalahkan apalagi membesar-besarkan wacana Islam Nusantara ini dan memaksa pihak lain untuk menolaknya, sebab ia hanya pemikiran yang masuk dalam kategori *furu'iyyah*. Media massa ini juga memberikan rekomendasi kepada pihak pro Islam Nusantara (pihak yang menanggapi dan merespons sikap MUI Sumatera Barat) untuk memberikan dan menjelaskan definisi yang jelas tentang Islam Nusantara dan tidak memaksakan pihak lain untuk menerima wacana ini.

Setelah membingkai *treatment recommendation* dari tiap-tiap media, peneliti menarik beberapa kata kunci yang dapat dijadikan *dispute resolution* konflik wacana Islam Nusantara ini. Media-media ini selain mengangkat sebuah isu pada beritanya juga memiliki upaya untuk menawarkan solusi untuk meminimalisasi ketegangan yang sedang berlangsung.

Dari pembingkaian ini peneliti mengambil tiga kata kunci yang dapat dijadikan *treatment recommendation* kasus ini. Pertama, persatuan dan keutuhan suatu sistem. Kedua, pendewasaan diri untuk tidak mempermasalahkan dan memerdebatkan sebuah pemikiran yang sifatnya *furu'iyyah* dan untuk diberikan pendefinisian Islam Nusantara secara utuh agar bisa dipahami dan

dihargai. Ketiga, tidak saling memaksakan kehendak pribadi atau kelompoknya. Islam Nusantara yang merupakan sebuah hasil pemikiran paham keagamaan hendaknya tidak saling dipaksakan untuk diterima dan juga sebaliknya bagi pihak yang tidak setuju hasil pemikiran tersebut hendaknya tidak mengajak atau memaksakan pihak lain untuk ikut menolaknya.

Penutup

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media memiliki kecenderungan masing-masing dalam memberitakan suatu peristiwa. Perbedaan ini dapat dilihat dari bagaimana media memberikan argumentasi pendefinisian masalah (*moral judgment*) di setiap pemberitaannya. Beberapa media memberikan argumentasi dengan tipologi yang berdifat profokatif dan lainnya ilmuah. Perbedaan tipologi juga memberikan dampak yang dapat menggiring opini publik untuk mengikuti apa yang diinginkan media.

Selain itu, dari empat elemen yang diberikan oleh Robert N. Entman memperlihatkan bahwa media juga memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam meredakan atau menyelesaikan ketegangan publik. Hal ini terlihat pada elemen terakhirnya yaitu *treatment recommendation* yang berusaha untuk membangun kepercayaan dengan skala prioritas yang harus dipertahankan dalam suatu perselisihan. *Treatment Recommendation* dapat dijadikan sebuah solusi pada sebuah perselisihan atau konflik wacana yang terjadi di ruang media massa.

Daftar Pustaka

- Anggoro, Ayub Dwi. 2014. "Media, Politik, dan Kekuasaan: Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang Pemberitaan Hasil Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 di *TV One* dan *Metro TV*". *Jurnal Aristo*. Vol. 2 No. 2. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

- AS, A. Syafi'. 2016. "Pengaruh Nilai-Nilai Pancasila dan Ajaran Islam Terhadap Tujuan Pendidikan Nasional". *Jurnal Sumbula*. Vol. 1 No. 1. Jombang: Universitas Darul 'Ulum Jombang.
- Aziza, Aulia. 2016. "Relasi Agama dan Budaya". *Jurnal Albadharah*. Vol. 15 No. 30. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antarsari Banjarmasin.
- Bifagih, Taufik. 2016. "Islam Nusantara; Strategi Kebudayaan NU di Tengah Tantangan Global". *Jurnal Aqlam*, Vol. 2 No, 1. Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Bizawie, Zainl Milal. 2016. "Islam Nusantara Sebagai Subjek dalam Islamic Studies: Lintas Diskursus dan Metodologis". dalam Akhmad Sahal. *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan, Cetakan III.
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*". California: Stanford University Press.
- Damarjati, Danu. 2018 "MUI Sumatera Barat Tolak Islam Nusantara". dalam *detiknews*. Rabu, 25 Juli. 16:45 WIB.
- Dwijayanto, Arik. 2017. "Pribumisasi Islam Nusantara: Antara Nalar Beragama dan Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia". *Jurnal Qalamuna* .Vol. 10 No. 2. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Sunan Giri.
- Entman, Robert N. 1993. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm", *Journal of Communication*. Vol. 43 No. 4. Washngton, D.C: International Communication Association.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS, Cetakan VI.
- Fata, Ahmad Khoirul dan Moh. Nor Ichwan. 2017. "Pertarungan Kuasa dalam Wacana Islam Nusantara". *Jurnal Islamica*. Vol. 11 No. 2. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Luthi, Khabibi Muhammad. 2016. "Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal". *Jurnal Shahib*. No. 1 Vol. 1. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

- Maramis, Meylan M. 2013. "Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa Alternative Dispute Resolution". *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 21 No. 04. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Morgan, David. 2008. *Key Words in Religion, Media and Culture*. New York dan London: Routledge.
- Muhajir, Afifuddin. 2016. "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia". dalam Akhmad Sahal. *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan, Cetakan III.
- Mustofa, Saiful. 2015. "Meneguhkan Islam Nusantara Untuk Islam Berkemajuan: Melacak Akar Epistemologis dan Historis Islam di Nusantara". *Jurnal Episteme*. Vol. 10 No. 2. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Putri, Zunita Amalia. 2018. "MUI Sumbar Tolak Islam Nusantara, Ini Kata MUI Pusat", dalam *detiknews*. Rabu 25 Juli. 17:32 WIB.
- Qomar, Mujamil. 2015. "Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam". *Jurnal El Harakah*, Vol. 17 No. 2. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Romli, Mohammad Guntur dan Tim Ciputat School. 2015. *Islam Kita, Islam Nusantara: Lima Nilai Dasar Islam Nusantara*. Jakarta: Ciputat School.
- Safitri, Dini. 2017. "Kontestasi Retorika Islam Nusantara di Media Baru". *Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*. Vol, 11 No, 2. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sahal, Akhmad. 2016. *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan, Cetakan III.
- Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan VI.
- Susanto, Edy dan Karimullah. 2016."Islam Nusantara: Islam Khas dan Akomodasi terhadap Budaya Lokal". *Jurnal Al-Ulum*.

Vol. 16 No. 1. Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri Gorontalo.

Takdir, Muhammad. 2017. "Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial: Studi Kasus Kekerasan Berbasis Sektarian dan Komunal di Indonesia". *Jurnal Ri'ayah*. Vol. 02 No. 1. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Curup Utara.

Wahid, Abdurrahman. 2015. "Pribumisasi Islam". dalam Akhmad Sahal. *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan Pustaka, Cetakan II.